

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

IPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Media : Radar Sampit Halaman : 01

Kompas Kalteng Pos Borneo News

Palangka Post Tabengan

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Tiga Pemda Pertahankan WTP



Kemarin ada dana lain yang merupakan dana dari kami juga, tapi kami gunakan untuk yang lain, karena Kotim ada utang beberapa tahun lalu gara-gara Covid-19, tapi seluruh yang kami gunakan itu sudah kami kembalikan

Halikinnor, Bupati Kotim

**BPK Apresiasi
Pemkab Kotim
Telah Kembalikan
Hasil Temuan**

PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim), dan Sukamara berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keu-

angan (BPK) RI Perwakilan Kalteng atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Penyerahan dokumen LHP tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalteng, Senin (20/5).

Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng M Ali Ashyar mengungkapkan, tiga daerah yang LHP-nya diumumkan kemarin semuanya mendapat opini WTP.

► *Baca: Tiga...Hlm 7*

Namun, khusus untuk Pemkab Kotim, ada satu persoalan menyangkut pengelolaan keuangan, yakni adanya saldo cash yang digunakan untuk belanja hal-hal yang di luar peruntukan.

"Dalam upaya transparansi dan profesionalisme kami perlu mengungkapkan adanya suatu kondisi, suatu hal, yakni masalah saldo cash yang digunakan untuk hal-hal yang sudah diatur penggunaannya, sudah dibatasi untuk apa, tapi dibelanjakan untuk hal-hal yang di luar peruntukan," jelas Ali saat menyampaikan sambutan dalam seremonial penyerahan LHP.

Meski demikian, ia mengapresiasi Pemkab Kotim yang sudah berupaya mengembalikan seluruh hasil temuan itu. Demikian pula dengan Pemkab Kobar dan Sukamara. Seluruh temuan hasil audit BPK sudah dikembalikan oleh pemerintah setempat.

"Dengan opini WTP ini, pemerintah daerah diharapkan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan," tuturnya.

Ali Ashyar menjelaskan, tiap pemeriksaan keuangan yang

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media :	Radar Sampit	Halaman :
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

dilakukan terhadap LKPD akan menghasilkan opini. Salah satunya opini WTP, yang menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah baik. Terkait dengan penggunaan keuangan yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana yang ditemukan di Pemkab Kotim, Ali menyebut itu merupakan peninggalan dari pemerintahan sebelumnya.

"Kalau Pak Bupati cerita itu kan peninggalan bupati sebelumnya, artinya dulu ada banyak proyek gede, sementara kondisi keuangan, sehingga banyak utang, kemudian dengan anggaran yang terbatas itu diatur agar bias menutupi utang," kata Ali kepada awak media.

Terkait keuangan yang digunakan tidak sesuai ketentuan, Ali menyebut ada bermacam-macam. Ada yang bersumber dari belanja dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), maupun transfer daerah yang digunakan untuk membayar gaji pegawai.

"Dana yang ada itu seharusnya digunakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, tapi malah dipakai untuk menggaji PTT, PPPK, karena enggak ada cukup uang untuk menggaji dari alokasi yang ada. Padahal harusnya kan untuk pendidikan atau kesehatan, itu hasil pemeriksaan tahun kemarin,

tapi peninggalan pemerintahan sebelumnya, karena angkanya besar, menumpuk, sehingga tidak bisa lunas, sementara pembangunan harus terus berjalan," jelas Ali.

Adapun nominal tunggakan itu mencapai Rp50 miliar. Namun jika ditotal dengan peninggalan pemerintahan sebelum, angkanya lebih banyak. "Pak Bupati harus mengembalikan posisi dana itu, nah sesuai rencana dana bagi hasil dari Kementerian Keuangan nanti digunakan untuk menutup atau mengembalikan itu," sebutnya.

Di tempat yang sama, saat dikonfirmasi awak media terkait temuan berupa penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, Bupati Kotim Halikinnor menjelaskan, sejak 2005 lalu pihaknya sudah membuat program pendapatan.

"Jadi misalnya pendapatan dari PAD, DBH, DAU, kemarin ada dana lain yang merupakan dana dari kami juga, tapi kami gunakan untuk yang lain, karena Kotim beberapa tahun yang lalu ada utang gara-gara Covid-19, tapi seluruh yang kami gunakan itu sudah kami kembalikan," ujarnya.

Halikin mencontohkan dana BOS. Dana tersebut tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Namun untuk sementara pihaknya menggunakan dana itu untuk

membayar utang gaji pegawai.

"Karena awal Januari 2024 kemarin kami menggunakannya untuk melunasi semua TPP, semua DBH desa, sehingga beban utang daerah tidak ada lagi terhadap desa, pegawai, alias kewajiban sudah diselesaikan, sehingga tahun depan sudah sesuai," tandasnya.

BPK Beberkan Temuan

Kepala BPK Perwakilan Kalteng M Ali Asyhar mengungkap hasil temuan pihaknya atas pelaksanaan event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kotim tahun 2023 lalu. Ada temuan-temuan berupa penggunaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun, BPK menyebut pemerintah daerah setempat sudah melakukan pengembalian kerugian negara.

Ali Asyhar menjelaskan, Kotawaringin Barat (Kobar) merupakan daerah dengan penilaian sistem pengendalian internal (SPI) tertinggi di Kalteng. Daerah kedua yang menyandang predikat tertinggi itu adalah Kotawaringin Timur (Kotim). Meski demikian, pihaknya memberikan catatan kepada Pemkab Kotim karena ada sejumlah temuan hasil audit yang dilakukan pihaknya, khususnya perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

"Temuan-temuan itu seperti penggunaan KAS, BOS, lalu

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	4
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media : Radar Sampit Halaman :

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

belanja. Termasuk Porprov kemarin juga ada temuan, dananya enggak bisa dipertanggungjawabkan," beber Ali Asyhar kepada awak media di Kantor BPK Perwakilan Kalteng, Senin (20/5).

Ali membeberkan, temuan sekitar Rp511 juta sudah dikembalikan oleh pemerintah daerah setempat. Penggunaan dana tidak jelas. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. SPJ pun tidak ada. Menurutnya, itu sudah termasuk kerugian negara.

Ali menyebut, setelah diketahui adanya temuan potensi kerugian negara, sekarang ini tren yang terjadi adalah pemerintah daerah langsung mengembali-

kan sesuai nominal temuan.

Kepala Sub Auditorat Kalteng 1 BPK Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar menambahkan, temuan dana hibah porprov itu menjadi temuan karena tidak tertib administrasi. Kemudian, setelah pihaknya periksa lebih detail sesuai prosedur, disimpulkan ada potensi kerugian negara.

"Kemudian mereka langsung mengembalikan sesuai nominal kerugian, yakni Rp511 juta. Mereka mengembalikan itu tidak lama setelah diskusi, nilainya sudah pasti, semuanya meyakini itu angka sudah tepat, setahu saya tidak sampai seminggu langsung diselesaikan," terangnya. **(dan/ce/ala)**